STRATEGI PREVENTIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS FESTIVAL BUNGA DAN BUAH KABUPATEN KARO)

Rai Vevito Sembiring
NPP. 33.0103
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: vevitorai@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Wiredarme, S.Pd., MH.
Email: wiredarme@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The growth of cultural festivals in Indonesia reached 550 events in 2025, yet often accompanied by public order disruptions such as traffic congestion, criminal acts, and mass riots. The 2025 Karo Regency Flower and Fruit Festival demonstrated a phenomenon that differs from the general trend by achieving zero major incidents despite hosting 80,000 visitors under limited infrastructure conditions.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the preventive strategy of Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karo Regency in maintaining public order and tranquility at the Flower and Fruit Festival.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach with single case study design. Data were collected through in-depth interviews with five informants, indirect observation of official documents, and documentation study. Data analysis utilized Soekanto's (2007) three-tier prevention framework: primary, secondary, and tertiary prevention.* ***Result:*** *Research findings reveal comprehensive preventive strategy implementation: (1) primary prevention through massive socialization using 47 banners, local radio, and 10,000 leaflets achieved 87% awareness; (2) secondary prevention through mapping seven critical points, establishing 12 security posts, and coaching 120 street vendors achieved 95% compliance; (3) tertiary prevention for 12 violators with educational approach resulted in 0% recidivism. The distinctive feature is integration of Karo local wisdom (mejuah-juah, runggu, daliken si telu) which transformed order enforcement from coercive activity into communal moral obligation.* ***Conclusion:*** *This study concludes that Satpol PP's preventive strategy in Karo Regency effectively maintained public order during the festival. It is recommended to optimize information technology and social media utilization, and strengthen collaboration with various stakeholders including entrepreneurs to enhance Satpol PP participation in maintaining public order at large-scale events.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Karo Local Wisdom; Mass Events; Preventive Strategy; Public Order;*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pertumbuhan festival budaya di Indonesia mencapai 550 acara pada tahun 2025, namun sering diiringi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) seperti kemacetan, tindak kriminal, dan kerusuhan massa. Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2025 menunjukkan fenomena yang berbeda dari tren umum dengan berhasil mencatat nol insiden besar meskipun dihadiri 80.000 pengunjung dalam kondisi infrastruktur terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karo dalam menjaga Trantibum pada Festival Bunga dan Buah. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan, observasi tidak langsung terhadap dokumen resmi, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan kerangka tiga tingkatan pencegahan Soekanto (2007): pencegahan primer, sekunder, dan tersier. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan implementasi strategi preventif yang komprehensif: (1) pencegahan primer melalui sosialisasi masif menggunakan 47 spanduk, radio lokal, dan 10.000 leaflet menghasilkan kesadaran 87%; (2) pencegahan sekunder melalui pemetaan tujuh titik kritis, pendirian 12 pos pengamanan, dan pembinaan 120 pedagang kaki lima dengan tingkat kepatuhan 95%; (3) pencegahan tersier terhadap 12 pelanggar dengan pendekatan edukatif menghasilkan residivisme 0%. Keunikan utama adalah integrasi kearifan lokal Karo (*mejuah-juah*, runggu, daliken si telu) yang mengubah penegakan ketertiban dari aktivitas koersif menjadi kewajiban moral komunal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo dalam menjaga Trantibum pada Festival Bunga dan Buah telah berjalan efektif. Adapun saran penelitian yakni perlunya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan guna meningkatkan partisipasi Satpol PP dalam menjaga ketertiban pada event berskala besar.

Kata kunci: Event Massal; Kearifan Lokal Karo; Ketertiban Umum; Satuan Polisi Pamong Praja; Strategi Preventif;

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Warisan budaya yang beragam ini terus dilestarikan sebagai bagian integral dari identitas nasional. Pemerintah Indonesia secara strategis menempatkan festival budaya sebagai instrumen multifungsi dalam mencapai tiga tujuan sekaligus. Pertama, festival berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang dinamis. Kedua, festival menjadi sarana pelestarian tradisi hidup (*living tradition*). Ketiga, festival berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan industri kreatif di tingkat regional maupun nasional.

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan festival budaya ini tercermin dari pertumbuhan eksponensial penyelenggaraan acara-acara budaya dalam enam tahun terakhir. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan lonjakan drastis dari 298 festival pada

tahun 2019 menjadi 550 festival pada tahun 2025-sebuah peningkatan luar biasa sebesar 85%, meskipun sempat mengalami kontraksi total pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, antusiasme tinggi ini tidak datang tanpa tantangan yang serius. Seiring dengan meningkatnya jumlah festival, risiko terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) juga meningkat secara signifikan. Data komprehensif mencatat sedikitnya 40 kasus gangguan serius selama periode 2023-2025 di berbagai festival Indonesia. Gangguan-gangguan tersebut bervariasi mulai dari kemacetan lalu lintas yang parah, krisis pengelolaan sampah dan sanitasi, aktivitas kriminal oportunistik, hingga potensi kerusuhan massa yang mengancam nyawa pengunjung dan mencerminkan kegagalan manajemen keamanan *event*.

Di tengah maraknya tren gangguan Trantibum tersebut, Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo hadir sebagai sebuah anomali positif yang luar biasa. Berawal dari perayaan lokal tahun 1980-an di Berastagi yang terkenal dengan wilayah yang kaya akan komoditas hortikultura, sehingga festival ini bertransformasi secara dramatis. Sempat menyentuh titik nadir tanpa aktivitas pada tahun 2020 akibat pandemi, *mega-event* berskala internasional ini bangkit secara revolusioner hingga sukses menjaring 80.000 pengunjung pada tahun 2025.

Uniknya, lonjakan massa yang masif tersebut sama sekali tidak diikuti oleh peningkatan kriminalitas. Sebaliknya, festival ini mencatatkan prestasi gemilang berupa *zero major incident* (nol insiden besar) sepanjang pelaksanaannya di tahun 2025. Keberhasilan ini membuktikan efektivitas pemenuhan kewajiban pemerintah dalam menjaga Trantibum, sebuah fondasi krusial yang menciptakan ruang aman bagi masyarakat dan birokrasi untuk beraktivitas secara harmonis sesuai kewenangan masing-masing (Eviany & Sutiyo, 2023).

Fenomena keberhasilan di Kabupaten Karo ini menjadi sangat menarik untuk dikaji secara akademik. Sebab, seperti yang ditekankan oleh (Labolo, 2016) bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap individu maupun kolektif masyarakat, maka negara memikul tanggung jawab mutlak untuk menjamin stabilitas tersebut. Keberhasilan pengelolaan ketertiban pada *event* massal sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antarinstansi, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui mekanisme *collaborative governance* (Emerson, K., & Nabatchi, 2015)

Prestasi keamanan ini tentu tidak tumbuh di ruang hampa. Di sinilah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karo mengambil peran krusial melalui strategi preventif, salah satunya dengan mengoptimalkan komunikasi publik sebagai instrumen strategis. Melalui tata kelola komunikasi yang tepat untuk membangun pemahaman bersama, Satpol PP tidak hanya mampu menjaga legitimasi pemerintah, tetapi juga secara efektif meminimalkan potensi konflik sebelum sempat membesar di tengah masyarakat maupun media massa.

Keberhasilan ini bukan sekadar prestasi keamanan teknis, melainkan refleksi dari kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat secara holistik. Perlindungan masyarakat merupakan bagian integral dari tugas pemerintahan modern yang menciptakan rasa aman, nyaman, dan tertib (Eviany & Sutiyo, 2023). Dengan demikian, upaya menjaga Trantibum tidak hanya sebagai enforcement regulasi, tetapi sebagai bentuk pelayanan publik yang beroientasi pada perlindungan nyata.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh strategi preventif, koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penegakan ketertiban umum dalam konteks rutin, pencegahan radikalisme, pengamanan kegiatan politik, maupun pengelolaan kerumunan dari aspek teknis. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi preventif Satpol PP pada event massal berbasis budaya lokal masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menjadikan kearifan lokal sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas strategi preventif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada Festival Bunga dan Buah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi utama pengelolaan ketertiban.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dan mendesak mengingat semakin berkembangnya penyelenggaraan festival budaya sebagai instrumen promosi pariwisata daerah yang memerlukan panduan praktis, berbasis bukti empiris, untuk pengelolaan Trantibum yang efektif dan efisien. Kajian mendalam dan sistematis terhadap keberhasilan Satpol PP Kabupaten Karo dapat memberikan model alternatif dan inovatif untuk pengelolaan keamanan festival yang berbasis pada pendekatan preventif yang humanis, dan terintegrasi dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan tetap kekurangan dasar empiris yang kuat dan tervalidasi dalam memahami pola serta tingkat keterlibatan Satpol PP secara faktual pada *event* massal. Perumusan strategi pengembangan program pengelolaan ketertiban pada event massal berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Upaya penguatan pengelolaan keamanan festival dapat berjalan kurang optimal bahkan berpotensi stagnan karena tidak didukung oleh data dan analisis yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan dan sistematis. Oleh karena itu, penelitian empiris yang mendalam seperti yang dilakukan pada studi ini menjadi sangat relevan. Sebelum mengurai temuan penelitian, akan dipaparkan terlebih dahulu bagaimana penelitian-penelitian terdahulu telah berkontribusi pada pemahaman tentang strategi preventif.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penegakan ketertiban dan pengelolaan *event* massal yang dirancang dengan baik. Suhendi (2019) meneliti peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan Trantibum dipengaruhi oleh kemampuan Satpol PP dalam menerapkan prosedur operasional yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan karakteristik gangguan ketertiban yang dihadapi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Suhendi berorientasi pada pelaksanaan

fungsi Trantibum secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada strategi preventif Satpol PP dalam pengamanan event massal berbasis kearifan lokal.

Still (2020) mengembangkan kajian *crowd science* yang menekankan pentingnya pemahaman perilaku kerumunan, identifikasi titik risiko, serta pengelolaan massa melalui pendekatan preventif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengamanan acara berskala besar sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam mengantisipasi potensi gangguan sebelum terjadi. Temuan (Still, 2020) memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya pendekatan preventif dalam pengelolaan kerumunan. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan aspek teknis *crowd management*, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi preventif Satpol PP yang mengintegrasikan dimensi sosial-budaya dan kearifan lokal dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Jumadil et al., (2022) meneliti upaya penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketiga pendekatan tersebut menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sarana dan prasarana operasional. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas upaya Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, penelitian Jumadil et al. berfokus pada penegakan ketertiban secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji strategi preventif Satpol PP pada event massal dengan pendekatan kearifan lokal sebagai instrumen utama pengelolaan ketertiban.

Tefa & Purbosiwi (2023) meneliti penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima telah dilaksanakan namun belum berjalan optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pedagang, serta ketidaksesuaian lokasi relokasi yang disediakan pemerintah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, penataan ulang lokasi relokasi, dan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum, namun berbeda pada fokus penelitian. Tefa dan Purbosiwi berfokus pada penertiban pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi preventif Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada event massal berbasis kearifan lokal.

Handayani & Wiredarme (2024) meneliti implementasi deteksi dan cegah dini dalam pencegahan radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas strategi preventif ditentukan oleh kemampuan deteksi dini, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji pendekatan preventif dalam mengantisipasi potensi gangguan. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada pencegahan radikalisme, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi preventif Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada event massal berbasis kearifan lokal.

Selanjutnya, (Rukmana et al., 2025) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengelola ketertiban dan keamanan publik selama pemilihan umum 2024 di Kota Bandung. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya personel dapat dikompensasi melalui koordinasi yang efektif lintas sektor dan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika lapangan. Temuan Rukmana et al. relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa strategi preventif Satpol PP tidak sekadar bergantung pada kekuatan dan ketersediaan aparat, melainkan juga pada kemampuan manajemen operasional dan pemahaman konteks lokal yang mendalam. Perspektif ini membuka peluang untuk mengintegrasikan dimensi budaya lokal sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas strategi preventif, sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu tetapi menjadi kontribusi utama penelitian ini. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi preventif, koordinasi antarinstansi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam berbagai konteks.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada penegakan ketertiban umum dalam konteks rutin, pencegahan radikalisme, penertiban pedagang kaki lima, maupun pengamanan kegiatan politik dan kerumunan massa. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi preventif, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji strategi preventif Satpol PP pada event massal budaya dengan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai instrumen utama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus memperkaya literatur mengenai pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum berbasis budaya lokal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang merupakan kontribusi baru dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan yakni menganalisis strategi preventif Satpol PP dalam menjaga Trantibum pada event massal berskala besar (80.000 pengunjung) dengan integrasi kearifan lokal Karo sebagai inti dan fondasi dari strategi keamanan. Hal ini menambahkan dimensi budaya yang belum dieksplorasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed-methods*. Selain itu, pengukuran, indikator, dan teori yang digunakan peneliti menggunakan kerangka tiga tingkatan pencegahan (Soekanto, 2007) yang diaplikasikan secara spesifik pada konteks festival budaya dengan pendekatan kearifan lokal yang integratif, bukan hanya pada ketertiban rutin harian seperti dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis strategi preventif Satpol PP dalam pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum pada event massal budaya dengan mengintegrasikan kearifan lokal sebagai instrumen utama pencegahan gangguan ketertiban.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi preventif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada Festival Bunga dan Buah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mengetahui strategi preventif secara kuantitatif, tetapi juga memahami secara mendalam alasan, proses, dan dinamika implementasi strategi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena pengelolaan keamanan festival yang melibatkan interaksi antara aspek teknis operasional dengan dimensi sosial-budaya masyarakat Karo.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi tidak langsung, dan studi dokumentasi. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam pelaksanaan strategi. Informan terdiri dari: (1) Kepala Satpol PP Kabupaten Karo sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama; (2) Kabid Penegakan Perda dan Koordinator Lapangan Festival; (3) Anggota Satpol PP yang bertugas di pos pengamanan; (4) Tokoh masyarakat Karo; dan (5) Penyelenggara festival. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

Dalam konteks metodologi ini, penelitian juga mendasarkan diri pada panduan teknis yang dikembangkan Still (2020) mengenai dokumentasi dan analisis dinamika kerumunan. Meskipun Still fokus pada aspek teknis pengelolaan kerumunan dari perspektif keselamatan, prinsip-prinsip observasi dan pencatatan detail yang dikemukakan relevan untuk memastikan validitas data lapangan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pendekatan studi kasus ini diperkaya dengan sensitifitas terhadap dinamika spasial dan behavioral yang kompleks dalam konteks festival berskala besar.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka tiga tingkatan pencegahan (Soekanto, 2007): pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, khususnya di lokasi penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo menggunakan kerangka tiga tingkatan pencegahan (Soekanto, 2007): pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut. Secara keseluruhan, implementasi ketiga tingkatan pencegahan dapat dirangkum dalam tabel berikut yang juga menunjukkan bagaimana setiap tingkatan diintegrasikan dengan kearifan lokal Karo sebagai fondasi strategi.

Tabel 1
Tabel Analisis menggunakan kerangkat tiga tingkatan pencegahan (Soekanto, 2007):

Tingkatan	Strategi Utama	Integrasi Kearifan Lokal	Indikator Capaian
Primer	Sosialisasi masif (47 spanduk, radio lokal, 10.000 *leaflet*)	Nilai *mejuah-juah* sebagai framing moral	Kesadaran masyarakat 87%
Sekunder	Pemetaan 7 titik kritis, 12 pos pengamanan, pembinaan 120 PKL	Mekanisme *runggu* (musyawarah adat)	Kepatuhan pedagang 95%
Tersier	Pembinaan edukatif 12 pelanggar, pendekatan personal	Filosofi *daliken si telu*	Residivisme 0%

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

3.1. Strategi Pencegahan Primer

Pencegahan primer dilakukan melalui sosialisasi masif menggunakan multiple channels: pemasangan 47 spanduk di titik strategis, siaran radio lokal selama dua minggu, dan distribusi 10.000 *leaflet*. Hasil menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat mencapai 87% terhadap aturan festival. Capaian ini sejalan dengan prinsip deteksi dini dan pencegahan, bahwa intervensi komunikasi yang dilakukan jauh sebelum potensi gangguan muncul bukan setelah konflik terjadi, namun merupakan kunci efektivitas strategi preventif aparat pemerintah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Karo menerapkan strategi komunikasi berbasis budaya lokal melalui penggunaan bahasa Karo dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban selama Festival Bunga dan Buah berlangsung.

Keunikan strategi primer terletak pada integrasi nilai *mejuah-juah* (keramahan tulus) dalam komunikasi preventif. Setiap materi sosialisasi menekankan Festival sebagai ajang *mejuah-juah* kepada tamu, sehingga kepatuhan aturan bukan sekadar *compliance* tetapi bagian dari kewajiban moral komunal masyarakat Karo.Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh intensitas penyampaian informasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan nilai-nilai budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal dapat berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat karakter masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap norma sosial secara sukarela (Sibarani, 2018). Dengan demikian,

pendekatan preventif yang diterapkan Satpol PP Kabupaten Karo berhasil mengubah kepatuhan masyarakat dari yang semula bersifat administratif menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dari nilai budaya setempat.

Keberhasilan pencegahan primer tersebut menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pencegahan sekunder. Tingkat kesadaran masyarakat yang telah terbentuk melalui proses sosialisasi memudahkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan, pemetaan risiko, serta pembinaan terhadap kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban selama festival berlangsung. Dengan demikian, strategi pencegahan sekunder tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi kelanjutan dari upaya pencegahan primer yang telah lebih dahulu membangun kepatuhan masyarakat.

3.2. Strategi Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder meliputi tiga komponen: (1) pemetaan tujuh titik kritis berpotensi *crowd crush* berdasarkan data historis dan simulasi *crowd flow*; (2) pendirian 12 pos pengamanan strategis dengan rasio 1 pos per 6.700 pengunjung; (3) pembinaan 120 pedagang kaki lima melalui mekanisme *runggu* (musyawarah adat) sebelum festival. Tingkat kepatuhan pedagang mencapai 95% tanpa sanksi tegas.

Pendekatan musyawarah melalui mekanisme *runggu* menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak dibangun melalui pola instruksi sepihak, melainkan melalui proses dialog dan pencarian kesepahaman bersama. Mekanisme runggu dalam hal ini bekerja persis seperti yang dijelaskan (Ostrom, 1990) dalam teori *governing the commons*: aturan yang lahir dari kesepakatan komunal jauh lebih ditaati dibandingkan regulasi yang dipaksakan dari atas, karena masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas aturan tersebut. Pendekatan berbasis budaya lokal mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif (Sibarani, 2020). Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan pedagang kaki lima tidak hanya dipengaruhi oleh kewenangan Satpol PP, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap nilai-nilai yang disampaikan.

Pembinaan dan penataan terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban merupakan bagian penting dalam strategi preventif Satpol PP. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran selama kegiatan berlangsung (Tefa & Purbosiwi, 2023). Meskipun berbagai langkah pencegahan dan pembinaan telah dilakukan, potensi pelanggaran tetap dapat terjadi dalam pelaksanaan event yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Karo juga menyiapkan mekanisme penanganan terhadap individu yang melakukan pelanggaran sebagai bagian dari pencegahan tersier. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani secara proporsional sekaligus mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran di kemudian hari.

3.3. Strategi Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier diterapkan terhadap 12 pelanggar dengan pendekatan edukatif, bukan punitif. Setiap pelanggar diberi pembinaan personal menggunakan filosofi *daliken si telu* (tiga tungku: *sangkep nggeluh, tutur sipatnggeluh, rakut sitelu-telu*) yang menekankan keseimbangan antara hak individu, kewajiban sosial, dan harmoni komunal. Hasil menunjukkan tingkat residivisme 0% - tidak ada pelanggar yang mengulangi kesalahan.

Tokoh masyarakat Karo yang dilibatkan dalam proses pembinaan menunjukkan apresiasi terhadap pendekatan Satpol PP. Mereka melihat bahwa penggunaan mekanisme daliken si telu bukan hanya strategi administratif, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai budaya komunal yang telah diyakini turun-temurun. Dimensi ini memberikan legitimasi budaya yang kuat terhadap keputusan Satpol PP, sehingga masyarakat merasa bahwa penegakan hukum bukan tekanan dari pemerintah, melainkan panggilan dari komunitas sendiri untuk menjaga integritas festival.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat argumen (Getz & Page, 2016) bahwa sistem analisis resiko dan koordinasi pemangku kepentingan merupakan fondasi yang krusial dalam keamanan acara. Namun penelitian ini menambahkan dimensi baru: integrasi kearifan lokal bukan sekadar pelengkap tetapi strategi inti yang mengkompensasi keterbatasan sumber daya.

Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan (Emerson & Nabatchi, 2015) yang menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun tujuan bersama dan menghasilkan kinerja kolektif yang efektif. Dalam penelitian ini, keberhasilan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya berasal dari peran Satpol PP semata, tetapi merupakan hasil dari kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat lokal secara simultan.

Di sisi lain, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang berbasis budaya lokal mampu menjadi solusi terhadap keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi organisasi pemerintah. Modal sosial yang terbentuk melalui hubungan kepercayaan, norma bersama, dan partisipasi masyarakat terbukti memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal (Sayuti, 2016).

Temuan penelitian ini juga menegaskan pandangan (Still, 2020) tentang pentingnya pemahaman psikologi kerumunan (*crowd psychology)* dalam keamanan festival. Penelitian ini memperluas kerangka pemikiran (Still, 2020) dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya (*cultural values)* dapat menjadi motivator intrinsik (*intrinsic motivator)* yang lebih kuat dibanding regulasi atau pengawasan eksternal dalam membentuk perilaku kerumunan massa (*crowd behavior).*

Dalam hal ini, penelitian (Jumadil et al., 2022) yang menunjukkan perspektif berbeda, dimana temuan mereka menemukan hambatan struktural serius, seperti pendekatan preventif terhambat keterbatasan SDM dan sarana, penelitian ini membuktikan bahwa faktor kualitatif

berupa integrasi budaya mampu mengkompensasi berbagai keterbatasan sumber daya yang bersifat kuantitatif. Satpol PP Karo dengan personel terbatas (rasio 1:6.700) mencapai efektivitas lebih tinggi dibanding festival lain dengan rasio lebih ideal namun tanpa pendekatan kultural.

Temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang luas. Jika kearifan lokal mampu mengkompensasi keterbatasan sumber daya material, maka pemerintah daerah (khususnya yang berada di wilayah dengan anggaran terbatas) tidak harus menunggu penambahan personel atau pengadaan teknologi untuk mencapai ketertiban yang efektif. Yang dibutuhkan adalah investasi pada modal sosial: membangun kepercayaan, menghormati nilai budaya komunitas, dan menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam tata kelola ketertiban (Ostrom, 1990; Putnam, 2000). Inilah yang membedakan penelitian ini secara fundamental dari pendekatan keamanan konvensional.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pengamanan, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam setiap tahapan pencegahan. Integrasi tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta membantu mengatasi berbagai keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan event massal.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berinteraksi selama penyelenggaraan Festival Bunga dan Buah. Untuk memperjelas temuan tersebut, peneliti menyajikan ringkasannya pada tabel berikut:

Tabel 2
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Preventif Satpol PP Kabupaten Karo:

Faktor	Uraian	Dampak terhadap Strategi Preventif
Dukungan Pemerintah Daerah	Tersedianya dukungan anggaran dan kebijakan	Mempermudah pelaksanaan program preventif
Kolaborasi Stakeholder	Kerja sama dengan Polri, TNI, BPBD, dan tokoh adat	Memperkuat koordinasi pengamanan festival
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan tokoh adat dan pemuda lokal	Meningkatkan kepatuhan masyarakat
Keterbatasan Personel	Jumlah personel Satpol PP belum ideal	Membatasi jangkauan pengawasan lapangan
Keterbatasan Teknologi	Minimnya CCTV dan drone monitoring	Menurunkan efektivitas pemantauan massa
Kondisi Geografis	Jalan sempit dan berkelok di Berastagi	Menyulitkan pengaturan lalu lintas dan mobilitas

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa keberhasilan strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, dengan faktor pendukung memiliki kontribusi yang lebih dominan dibandingkan faktor penghambat. Dukungan pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi modal utama dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban selama Festival Bunga dan Buah berlangsung. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel, minimnya pemanfaatan teknologi, dan kondisi geografis wilayah tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan kearifan lokal yang mampu memperkuat kepatuhan masyarakat secara sukarela. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rukmana et al., 2025) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban umum tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi lintas sektor serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi preventif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada Festival Bunga dan Buah telah berjalan sangat efektif. Implementasi strategi preventif yang komprehensif meliputi tiga tingkatan: (1) pencegahan primer melalui sosialisasi masif menghasilkan kesadaran 87%; (2) pencegahan sekunder melalui pemetaan titik kritis dan pembinaan pedagang mencapai kepatuhan 95%; (3) pencegahan tersier dengan pendekatan edukatif menghasilkan residivisme 0%. Keunikan utama terletak pada integrasi kearifan lokal Karo (*mejuah-juah, runggu, daliken si telu*) yang berhasil mengubah penegakan ketertiban dari aktivitas koersif menjadi kewajiban moral komunal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi preventif Satpol PP Kabupaten Karo tidak hanya dipengaruhi oleh aspek operasional dan kelembagaan, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Karo. Nilai-nilai budaya seperti *mejuah-juah, runggu*, dan *daliken si telu* berfungsi sebagai instrumen sosial yang memperkuat kepatuhan masyarakat secara sukarela sehingga proses penegakan ketertiban dapat berlangsung lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Adapun saran penelitian ini yakni perlunya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan sosialisasi serta meningkatkan efisiensi koordinasi. Selain itu, disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* termasuk sektor swasta dan wirausahawan guna meningkatkan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan strategi preventif pada *event* massal berskala besar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Pertama, durasi penelitian yang terbatas (Januari 2026) mungkin tidak mampu menangkap dinamika penuh implementasi strategi preventif *across different seasons* atau kondisi eksternal. Kedua, penelitian ini hanya mengkaji satu kabupaten dengan festival spesifik sebagai studi kasus tunggal, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke konteks

festival atau daerah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik budaya, geografis, dan sosio-ekonomi berbeda. Ketiga, penelitian bergantung pada laporan *self-report* dari informan tentang efektivitas strategi, yang mungkin rentan terhadap bias sosial dan *social desirability response*.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi preventif Satpol PP di berbagai festival budaya Sumatera Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat digeneralisasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. In *Public Performance and Management Review* (Vol. 38, Issue 4). Georgetown University Press. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/

Getz, D., & Page, S. J. (2016). *Event studies: Theory, research and policy for planned events (3rd ed.). Routledge.* https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429023002/event-studies-stephen-page-donald-getz

Handayani, A., & Wiredarme. (2024). The implementation of early detection and prevention in the prevention of radicalism by the National and Political Unity Agency in Cimahi City, West Java Province. *Jurnal Tatapamong*. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4114

Jumadil, A., Jaya, A., Pasca, P., Sarjana, S., Tinggi, S., Hukum, I., & Watampone, P. (2022). *Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone The Enforcement of Public Peace and Order by the Bone District Civil Service Police Unit*. *XXVI*(2), 116–131. https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.461

Labolo, M. (2016). *Pengantar ketenteraman dan ketertiban umum*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. In *Cambridge University Press*. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. In *Simon & Schuster*. https://doi.org/10.1145/358916.361990

Rukmana, M. G., Aser, F., Supriatna, D., & Jamil, N. M. (2025). Effectiveness of civil protection unit policy implementation in managing public order and security in the 2024 Bandung elections. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v11i2.62977

Sayuti. (2016). Modal sosial dalam organisasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. https://eprints.ipdn.ac.id/5606/

Sibarani, R. (2018). The role of local wisdom in developing friendly city. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012094

Sibarani, R. (2020). Developing friendly city and friendly village based on local culture. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012062

Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada.

Still, G. K. (2020). *Introduction to crowd science (2nd ed.)*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/b17097

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698